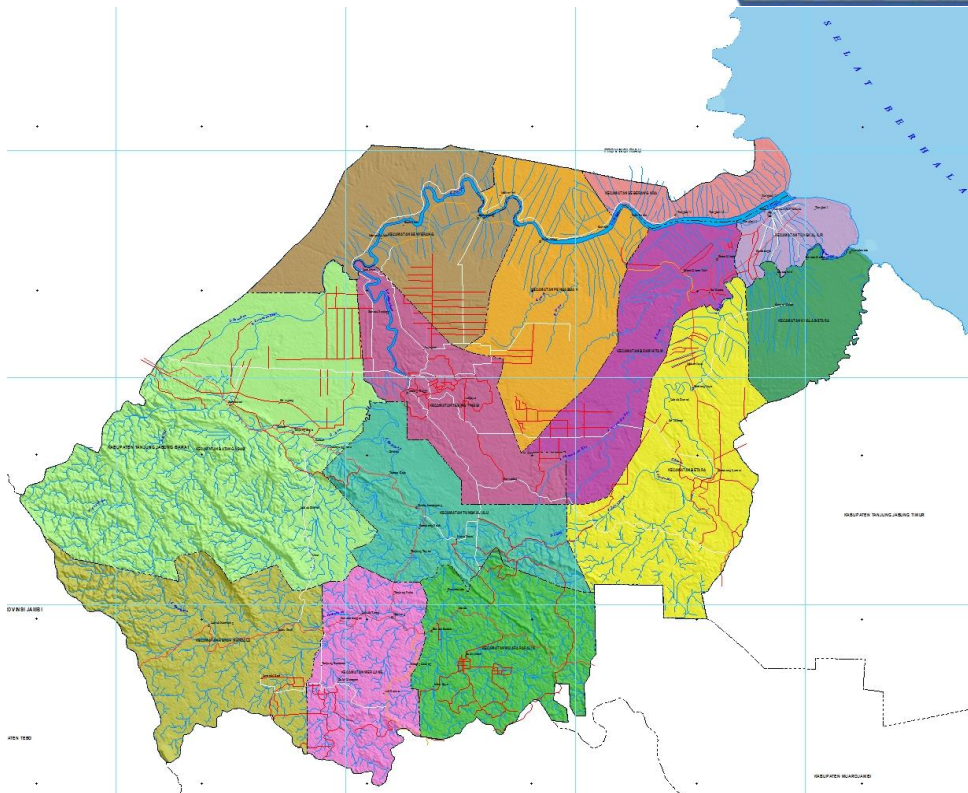


# LAKIP TAHUN 2016



**DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
KAB.TANJUNG JABUNG BARAT - PROV.JAMBI**

Jalan Prof.Dr.Sri Soedewi Maschun Sofyan, SH Kuala Tungkal 36512  
Phone/Fax : (0742) 7351051 Email : [disbunnaktanjabbarat@yahoo.com](mailto:disbunnaktanjabbarat@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

LAKIP Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 ini adalah penjabaran KINERJA dari *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)* Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016.

LAKIP adalah gambaran Kinerja **Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang telah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2016.

Tersusunnya LAKIP ini diharapkan akan terciptanya keterbukaan dalam pelaksanaan program/kegiatanm sesuai perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor **Perkebunan dan Peternakan** di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan **Dinamika Pembangunan** Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta mampu memenuhi kebutuhan perkembangan **IPTEK** dan **Isu Global** yang menjadi komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, 20 - 02 - 2017

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung jabung Barat



Ir. Melani Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1    Latar Belakang	1
1.2    Maksud dan Tujuan	3
1.3    Landasan Hukum	7
1.4    Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	9
<b>BAB II     Perencanaan Kinerja</b>	
2.1    Rencana Strategis	11
2.2    Rencana Kinerja Tahun 2016	22
2.3    Perjanjian Kinerja Tahun 2016	22
<b>BAB III    Akuntabilitas Kinerja</b>	40
3.1    Capaian Kinerja Organisasi	40
3.2    Akuntabilitas Anggaran ( Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)	51
<b>BAB IV    Penutup</b>	53
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* (kepemerintahan yang baik) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 adalah: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Adapun salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas untuk menuju "*good governance*" adalah menjalankan pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan kebijakan program yang telah ditetapkan, serta menyampaikan laporan tepat waktu dan akurat yang disusun dengan mengikuti petunjuk yang berlaku, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk memberikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yang disusun secara periodik. Adapun tujuan pelaporan Kinerja adalah: (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 ini merupakan salah satu dari wujud akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Agar suatu laporan pertanggungjawaban tersebut dapat diukur kinerjanya (*performance-nya*) secara lebih objektif baik dari aspek keluaran, hasil, manfaat maupun dampaknya, maka sejak awal pelaksanaan program/kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu instrumen tolok ukurnya, yakni dengan diterbitkannya dokumen Rencana Strategik (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK), yang didalamnya terdapat rincian indikator kinerja untuk diwujudkan selama tahun anggaran berjalan.

Terkait dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2015 ini, maka instrumen dokumen yang digunakan adalah: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-

2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat 2016, RKT serta Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016.

Pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan selama tahun 2016 dihadapkan kepada beberapa permasalahan aktual yang bersifat isu strategis sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b><u>Bidang Peternakan.</u></b>					
Persentase pertumbuhan dan populasi ternak.	Populasi ternak : - Sapi - Kerbau - kambing - Domba - Unggas	Laju pertumbuhan populasi ternak sebesar 2 % per tahun	a. SDM petugas peternak b. Masih tingginya kematian ternak c. Minimnya sarana dan prasarana d. Kurangnya ketersediaan obat hewan	a. Banyaknya pemotongan betina produktif b. Sulitnya mencari bibit ternak yang berkualitas c. Pencurian ternak masih banyak d. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan	a. Kurangnya tenaga medis dan paramedis b. Kelembagaan dan SDM Peternak c. Regulasi /Tata Ruang bidang peternakan d. Minimnya Infrastruktur dan sarana pelayanan teknis e. Kurangnya akses Peternak untuk mendapatkan modal.
<b><u>Bidang Perkebunan.</u></b>					
Produksi Hasil Perkebunan	Produksi Perkebunan : - Kelapa Sawit - Kelapa Dalam - Kopi - Pinang - Karet	Persentase pertumbuhan Produksi Perkebunan	a. SDM Petugas Perkebunan b. Minimnya sarana dan prasarana pendukung perkebunan	a.Pengetahuan petani yg masih rendah dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna. b.Kurangnya penggunaan IPTEK.	a. Masih kurangnya anggaran yg langsung bersentuhan dengan petani b. Pendidikan dan pelatihan yg berkesinambungan bagi tenaga teknis perkebunan
Mutu Produk			Ketersediaan	a. Masih tingginya	Pengetahuan

hasil perkebunan			teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan perkebunan	serangan organisme penyakit tanaman dan gangguan usaha perkebunan. b. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat diakses oleh masyarakat perkebunan c. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan dan agroindustri perkebunan yang masih rendah	SDM perkebunan dalam penguasaan Teknologi untuk peningkatan mutu hasil perkebunan
------------------	--	--	--	--	---

Permasalahan aktual tersebut selama kurun waktu tahun 2016 telah diupayakan untuk diatasi melalui berbagai langkah pelaksanaan Program/Kegiatan dari sumber anggaran APBD dan APBN, yang substansinya merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan, sebagaimana telah dikemas di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

## **1.2 MAKSUD dan TUJUAN**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai kekurangan yang harus diperbaiki di waktu mendatang, sekaligus meningkatkan berbagai upaya yang sudah berhasil dicapai.

LAKIP ini pada hakekatnya merupakan dokumen pertanggungjawaban kepala OPD kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dan peternakan selama tahun 2016 dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja dalam LAKIP ini.

Dalam LKIP ini diuraikan tentang pelaksanaan pembangunan Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan pada tahun 2016, yang diselenggarakan melalui 4 (empat) program pokok dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan pokok, serta 7 (tujuh) program penunjang dengan 19 (sembilan belas) kegiatan penunjang, yang keseluruhannya difasilitasi oleh sumber dana APBD.



### 1.3 DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

- Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
  - 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015-2025;
  - 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
  - 22) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 23) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
  - 24) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;
  - 25) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

#### 1.4 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK dan FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja dinas;
- b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkungan dinas Peternakan;
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;
- e. Membina **Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)**; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS (2016-2021).**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.

Dalam mekanisme pemerintahan, perencanaan pembangunan tersebut dijalankan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan yang terkoordinasi dan terintegrasi, untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakekatnya terkait erat, dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan tersebut, dimana hasil dari evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini akan menjadi acuan bagi tahapan siklus perencanaan selanjutnya. Oleh karena itu substansi dari LKIP ini harus memuat kajian terhadap dokumen perencanaan pembangunannya.

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2016, yang substansinya merupakan turunan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021 tersebut, adalah sebagai berikut:

### 2.1.1 VISI dan MISI.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan sistem Bioindustri yang berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta melihat potensi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat , maka Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Dinas Teknis yang berkepentingan membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Bidang Perkebunan dan Peternakan sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai **Visi Pembangunan** adalah :

***“ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKULAITAS  
MENUJU KETESEEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN  
PETANI”***

**Mengandung Makna** bahwa : “Mewujudkan pembangunan Perkebunan dan Peternakan dalam suatu penataan wilayah yang berwawasan lingkungan melalui pengintegrasian kegiatan *produksi, pengolahan , distribusi* kegiatan *On Farm* dan *Off Farm* dalam suatu **Sistim Manajemen** dengan menciptakan *Produk-Produk Ungulan* Perkebunan dan Peternakan yang memiliki daya saing dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan ketersediaan pangan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.

**Misi** adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan **Visi Pembangunan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021** tersebut, maka ditetapkan **3 Misi** yang diemban **Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Misi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode	MISI
<b>M.1</b>	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Petani dan Peternak serta kesejahteraan masyarakat.
<b>M.2</b>	Memanfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi.
<b>M.3</b>	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan.

## 2.1.2 TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas ditetapkanlah **Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat** sebagai berikut :

**Tabel 2.2** Tujuan Strategis (TS) Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Kode	Tujuan Strategis (TS)
<b>T.1</b>	Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Ternak.
<b>T.2</b>	Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan mutu hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK.
<b>T.3</b>	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan.
<b>T.4</b>	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan.



Untuk mengukur tingkat ketercapaian **Tujuan Strategis (TS)** Pembangunan Perkebunan dan Peternakan diperlukan beberapa **Sasaran Strategis (SS)** yg menggambarkan kondisi yg dicapai pada tahun 2021. Selanjutnya ditetapkan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)** untuk mengukur apakah **Sasaran Strategis (SS)** dapat mengkonfirmasi **Tujuan Strategis (TS)** yg akan dicapai pada masa mendatang (Tahun 2021). **Sasaran Strategis (SS)** untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. **Tujuan Strategis 1 (T.1)**, “Meningkatkan Populasi dan Produksi komoditi Perkebunan dan Peternakan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

**Tabel 2.3** Tujuan Strategis 1 (T.1)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :	
		Daging Sapi	378.567 kg
		Daging Kerbau	13.903 kg
		Daging Kambing	60.469 kg
		Daging Domba	608 kg
		Daging Unggas	2.524.952 kg
		Kelahiran Ternak Sapi IB	1.500 Ekor
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :	
		Sapi	8.096 ekor
		Kerbau	646 ekor
		Kambing	40.435 ekor
		Domba	670 ekor
		Unggas	1.335.957 ekor
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :	
		Sawit	147.790 ton
		Karet	15.863 ton
		Kelapa	61.635 ton
		Kopi	1.367 ton
		Pinang	12.375 ton

2. **Tujuan Strategis 2 (T.2),**” Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

**Tabel 2.4** Tujuan Strategis 2 (T.2)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS4	Menurunnya Angka Kematian Ternak.	Persentase Kematian Ternak minimal 1.5 %
SS5	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK	Pengembangan Agrobisnis Sektor Perkebunan : 1 sentra agrobisnis
		Penerapan IPTEK Budidaya dan Pascapanen tanaman perkebunan : 6 kelompok tani
		Tersedianya Blok Penghasil Tinggi : 3 Komiditi

3. **Tujuan Strategis 3 (T.3),**”Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** :

**Tabel 2.5** Tujuan Strategis 3 (T.3)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :	
		Luas Lahan Sawit	56.294 Ha
		Luas Lahan Karet	15.806 Ha
		Luas Lahan Kelapa	56.294 Ha
		Luas Lahan Kopi	3.310 Ha
		Luas Lahan Pinang	11.800 Ha
SS7	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan.	Jumlah Petani Perkebunan yg mengikuti Pelatihan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE): 60 kelompok Tani	
		Penguatan Kelembagaan kelompok Petani : 30 Asosiasi	
		Jumlah STD-B yg dimiliki Petani Perkebunan : 6.000 STD-B Agrobisnis.	
		Jumlah Kelompok Peternak yg menerapkan Teknologi Peternakan : 9 kelompok	

4. **Tujuan Strategis 4 (T.4),**” Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan ”, ditandai dengan tercapainya **Sasaran Strategis (SS)** sebagai berikut :

**Tabel 2.6** Tujuan Strategis 4 (T.4)

Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
SS8	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Peternakan	Terbangunnya Jalan Produksi Perkebunan : 40 km
		Jumlah Kelompok Tani yg menggunakan Peralatan untuk Budidaya dan Pasca Panen : 36 Kelompok

### 2.1.3 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Rumusan **Strategi** merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian Kebijakan. **Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

#### **S t r a t e g i**

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan melalui *Intensifikasi, Extensifikasi* dan *Diversifikasi*.
2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui *Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB)*, Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman, pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak, serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.
3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.

5. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna bagi pengembangan peternakan melalui **UPPO, Rumah Kompos, Biogas** dan lain lain.
6. Pengembangan *Sentra Agribisnis* di kawasan Sentra Perkebunan dan Peternakan.
7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkebunan dan peternakan.

### **K e b i j a k a n.**

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. *Kebijakan Umum* Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.
2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.
4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal dan berkelanjutan.

## 2.1.4 PROGRAM dan KEGIATAN

### BIDANG PERKEBUNAN :

#### 1. PROGRAM POKOK APBD TA.2016

1. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**
  - **Kegiatan** Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres.
  - **Kegiatan** Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya.
2. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).**
  - **Kegiatan** Pengendalian Hama Penyakit Tanaman
  - **Kegiatan** Peningkatan Perlindungan Usaha Perkebunan
  - **Kegiatan** Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)
3. **Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.**
  - **Kegiatan** Promosi atas hasil produksi perkebunan dan Informasi harga produksi perkebunan
4. **Program Peningkatan Produksi Perkebunan**
  - **Kegiatan** Pembinaan Lintas Sektoral
  - **Kegiatan** Pengolahan Data Statistik Perkebunan
  - **Kegiatan** Pembibitan Kelapa Sawit
  - **Kegiatan** Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom
  - **Kegiatan** Pengadaan Prasarana dan Sarana Perkebunan
  - **Kegiatan** Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan
  - **Kegiatan** Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat

### BIDANG PETERNAKAN :

#### 1. PROGRAM POKOK APBD TA.2016

1. **Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**
  - **Kegiatan** Pengolahan, updating dan analisis data dan statistic daerah.
2. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak**
  - **Kegiatan** Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
  - **Kegiatan** Pengawasan perdagangan ternak antar daerah.
  - **Kegiatan** Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak, Vaksin dan Peralatan Medis
3. **Program Peningkatan produksi hasil peternakan**
  - **Kegiatan** Pembibitan dan Perawatan ternak
  - **Kegiatan** Pengembangan Inseminasi Buatan.
  - **Kegiatan** P2WKSS

- **Kegiatan** Sinkronisasi Birahi
  - **Kegiatan** Pengelolaan Ternak Pemerintah
  - **Kegiatan** Penyangga Hari Besar Keagamaan
  - **Kegiatan** Hari Krida Pertanian
  - **Kegiatan** Pengembangan Sentra Peternakan
4. **Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi hasil peternakan**
- **Kegiatan** Promosi dan panen ternak hasil Inseminasi buatan
  - **Kegiatan** Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan
  - **Kegiatan** Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.
5. **Program Peningkatan Penerapan Teknologi peternakan**
- **Kegiatan** Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan**, dapat dilihat pada **Tabel 2.7** berikut ini:

**Tabel 2.7**

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021

<b>VISI : “ TERWUJUDNYA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKUALITAS MENUJU KETESEEDIAAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI ”</b>			
<b>MISI I: “Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan dan Peternakan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat”.</b>			
<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan populasi dan produksi Komoditi Perkebunan dan peternakan (T.1)	Meningkatnya produksi daging ternak (SS1)	1. Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit, Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan pemberdayaan peternak serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.	Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan guna mendukung peningkatan produksi peternakan.
	Meningkat nya populasi ternak (SS2)		
	Meningkatnya Produksi Komiditi Perkebunan (SS3)	1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas Hasil Perkebunan. 2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit Tanaman.	
<b>MISI II: “Memanfaatkan dan mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi Petani dan Peternak, sekaligus mendukung peningkatan Kualitas Produk Perkebunan dan Peternakan serta pengembangan Sumber Energi”.</b>			
<b>Tujuan Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mengurangi angka kematian dan kesakitan ternak dan meningkatkan Mutu Hasil Perkebunan dengan memanfaatkan IPTEK (T.2)	Menurunnya angka kematian ternak (SS4)	Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan gangguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status wilayah bebas penyakit menular strategis (PHMS).	Peningkatan pelayanan keswan melalui peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis dan paramedis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Mutu Hasil Perkebunan dengan Memamfaatkan IPTEK (SS5)	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Terapan pada pelaksanaan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pasca Panen bagi Petani Perorangan/Kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi teknis yg lebih intens untuk petani perorangan/kelompok melalui tenaga PPL.</li> <li>2. Memberi bantuan hibah langsung kepada masyarakat berupa bibit unggul, Pupuk, alat pengolahan pascapanen.</li> <li>3. Membangun dan memelihara sarana pendukung dan penunjang perkebunan.</li> </ol>
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Perkebunan dan Peternakan secara optimal dan berkelanjutan (T.3)	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif (SS6)	Meningkatkan pengelolaan lahan produktif dengan pengembangan tanaman penyegar tahunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg merupakan penunjang pengolahan perkebunan</li> <li>(2) Pendampingan oleh tenaga teknis lapangan</li> </ol>
	Meningkatnya SDM Pelaku Usaha Perkebunan dan Penguatan serta Pengembangan Kelembagaan (SS7)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelatihan secara berkesinambungan bagi petani dalam pengolahan lahan sebelum masa tanam dan pasca panen</li> <li>(2) Pendampingan secara berkala dan terstruktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi petani</li> <li>(2) Memberdsayakan PPL dalam pendampingan bagi petani</li> </ol>
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Perkebunan dan Peternakan (T.4)	Meningkatnya sarana dan prasarana Pembangunan Perkebunan dan Perkebunan (SS8)	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Meningkatkan penggunaan TTG</li> <li>(2) Budidaya penggunaan IPTEK untuk pengolahan pasca panen</li> <li>(3) Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan Produksi komoditi perkebunan dan ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Mengadakan bantuan bibit tanaman unggul dan ternak unggul bagi petani</li> <li>(2) Mengadakan bantuan sarana penunjang pengolahan dan pasca panen bagi petani</li> <li>(3) Mengadakan vaksin dan obata-obatan bagi peternak.</li> <li>(4) Pembangunan dan Rehabilitasi/Perbaikan Jalan Produksi</li> </ol>



## 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Perkebunan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016-2021, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.7 tersebut di atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan, yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, yang memuat target-target capaian indikator Sasaran Strategis, Sasaran Program, maupun Sasaran Kegiatan, dengan mempertimbangkan Isu Strategis, Arah Kebijakan Pembangunan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahun 2016 sendiri adalah terdiri dari 9 outcome dan 29 output dengan anggaran sebesar **Rp. 5,588,635,443.00** sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

### Jumlah Total Anggaran Bidang Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016

No	Bidang	Jumlah Anggaran
1	Bidang Perkebunan	Rp. 2,818,425,850.00
2	Bidang Peternakan	Rp. 2,770,209,593.00
Total Anggaran		Rp. 5,588,635,443.00

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), adalah:

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016, maka target kinerja yang diperjanjikan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Tanjab Barat Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

### **2.3.1 PERJANJIAN KINERJA UTAMA**

Perjanjian Kinerja Utama adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah (Bupati), dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator sasaran strategis dan tercantum dalam Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021. Perjanjian Kinerja Utama ini sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran strategis.

Untuk Tahun 2016 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.8. berikut ini:

**Tabel 2.8**  
**IKU Tahun 2016 Dinas Perkebunan dan Peternakan**

<b>BIDANG PERKEBUNAN</b>			
<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>	<b>Target</b>
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :	
		1.Sawit	133.858
		2.Karet	14.367
		3.Kelapa	55.824
		4.Kopi	1.238
		5.Pinang	11.208
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :	
		1.Luas Lahan Sawit	62.889
		2.Luas Lahan Karet	14.806
		3.Luas Lahan Kelapa	54.908
		4.Luas Lahan Kopi	3.073
		5.Luas Lahan Pinang	10.030
<b>BIDANG PETERNAKAN</b>			
<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis (SS)</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>	<b>Target</b>
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :	
		1.Daging Sapi	342.879
		2.Daging Kerbau	12.952
		3.Daging Kambing	54.769
		4.Daging Domba	551
		5.Daging Unggas	2.286.241
		6.Kelahiran Ternak Sapi IB	1.000
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :	
		1.Sapi	7.336
		2.Kerbau	613
		3.Kambing	40.235
		4.Domba	640
		5.Unggas	1.046.758

### **2.3.2 PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (Outcome) dan Kegiatan (Output).**

Perjanjian Kinerja Program adalah perjanjian yang disepakati antara Kepala OPD dengan Kepala Unit Kerja Esselon-III, dengan target Indikator kinerja yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Program (Outcome).

Sedangkan Perjanjian Kinerja Kegiatan yg disepakati antara Kepala Bidang Es. III dan Kepala seksi/Kasubbag Es.IV

Perjanjian Kinerja Program ini sebagai dasar pengukuran kinerja Program yang akan memperkuat hasil analisis dalam pengukuran pencapaian indikator sasaran *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016*. Adapun untuk tahun 2016 ini Perjanjian Kinerja Program yang dimaksud adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9 sebagai berikut:

**Bidang Perkebunan**

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Kegiatan (output)	Penanggung Jawab
	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>meningkatnya intensitas dan kualitas pelayanan administrasi</b>			Sekretaris
1	Penyediaan jasa surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		tersedianya honorarium jasa adm keuangan	12 bulan	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	
5	Penyediaan alat tulis kantor		tersedianya atk kantor	12 bulan	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
9	Penyediaan makanan dan minuman		tersedianya makan minum	12 bulan	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan administrasi</b>			Sekretaris
11	Pengadaan peralatan gedung kantor		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit	
12	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor		terpeliharanya gedung kantor	2 unit	
13	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		terpeliharanya kendaraan operasional	23 Unit	
14	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor		terpeliharanya peralatan gedung kantor	38 Unit	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur</b>			Sekretaris
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 stel	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS</b>			Sekretaris
16	Pengembangan SDM		jumlah PNS yg mengikuti pelatihan/ diklat	5 orang	

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

No	Uraian	Target Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Kegiatan (output)	Penanggung Jawab
	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Pertumbuhan insetif dan desintif bagi petani</b>			Bidang Produksi
17	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres		terpeliharanya kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres	9 Ha	
18	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya		terdata nya kebun sawit swadaya	3 Kec.	
	<b>Program peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)</b>	<b>meningkatnya kualitas hasil produksi perkebunan</b>			Bidang Sanpras
19	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman		teratasinya serangan OPT kebun rakyat	100 Ha	
20	Peningkatan perlindungan usaha perkebunan		terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan	13 Kec.	
21	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)		luas lahan terairi TAM	12 bulan	
	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>tersedianya sentra agrobisnis produk unggulan perkebunan</b>			Bidang Produksi
22	promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi harga produksi perkebunan		terlaksananya publikasi dan promosi produk unggulan daerah	12 bulan	



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	meningkatnya produksi 5 komoditi unggulan: kopi,karet,sawit,pinang ,kelapa dalam			
23	Pembinaan Lintas Sektoral		pengadaan bantuan lintas sektoral	50 org, 1 paket, 1 paket	Bidang Produksi
24	Pengolahan Data Statistik Perkebunan		tersedianya data statistik perkebunan	20 dok	Sekretaris Bidang Produksi
25	Pembibitan Kelapa Sawit		tersedianya bibit kelapa sawit yg bermutu	10.000 bibit	Bidang Produksi
26	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom		terpeliharanya BPT kelapa,pinang dan kopi libtukom	228.5 Ha Kelapa (3717 PIK),7 Ha Pinang (250 PIP),22 Ha Kopi (775 PIK)	Bidang Produksi
27	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian		terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana perkebunan	12 bulan	Bidang Sanpras
28	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan		tersedianya RENJA,RKA,DPA,TAPKIN dan LAKIP	3 dok	Sekretaris Bidang Produksi
29	Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat		intensifikasi lahan kopi rakyat	90 Ha	Bidang Produksi

**Bidang Peternakan**

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Kegiatan (Output)	Penanggung Jawab
	<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>meningkatnya intensitas dan kualitas pelayanan administrasi</b>			Sekretaris
1	Penyediaan jasa surat menyurat		tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		tersedianya honorarium jasa adm keuangan	140 OB	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bulan	
5	Penyediaan alat tulis kantor		tersedianya atk kantor	12 bulan	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		tersedianya komponen instalasi listrik	12 bulan	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
9	Penyediaan makanan dan minuman		tersedianya makan minum	12 bulan	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	
11	Penyediaan Iklan Layanan		tersediannya layanan iklan	12 bulan	

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>meningkatnya kelengkapan dan kualitas pelayanan administrasi</b>			Sekretaris
12	Pembangunan Gedung Kantor		terbangunnya gedung kantor	5 Unit	
13	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor		terpeliharanya gedung kantor	100%	
14	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		terpeliharanya kendaraan operasional	12 bulan	
15	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur</b>			Sekretaris
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 stel	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>peningkatan sistem kinerja, pelaporan dan keuangan</b>			Sekretaris
17	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		tersusunnya laporan kinerja dan keuangan	3 dok	

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

No	Uraian	Indikator Kinerja Program (outcome)	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja Kegiatan (Output)	Penanggung Jawab
	<b>Program pengembangan Data/informasi/statistik Daerah</b>	<b>peningkatan pengolahan data statistik peternakan</b>			Sekretaris
18	Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah		tersusunnya buku statistik peternakan	13 kec	
	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>	<b>menurunnya angka kematian ternak</b>			Bidang Produksi
19	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		jumlah ternak yg terlayani pengobatan,PKB,permeriksaan spesimen,vaksinasi,eliminasi	1000 ekor,1000 ekor,2000 ekor,1 paket, 2500 ekor, 100 ekor	
20	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah		terlaksananya pengawasan perdagangan ternak dan pemotongan	13 kec	
21	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak,Vaksin dan Peralatan Medis		tersedianya obat-obatan ternak dan peralatan medis veteriner	1 paket	

	Program peningkatan produksi hasil peternakan	meningkatkan populasi dan produksi hewan ternak:sapi,kerbau,kambing,domba,babi,ayam broiler,ayam buras,itik			Bidang Produksi
22	Pembibitan dan perawatan ternak		jumlah ternak yg dirawat	500 ekor	
23	Pengembangan Inseminasi Buatan		jumlah sapi IB	1500 ekor	
24	P2WKSS		terlaksannya kegiatan P2WKSS	2 kali	
25	Sinkronisasi Birahi		jumlah sapi IB	1000 ekor	
26	Pengelolaan Ternak Pemerintah		terkelolanya ternak pemerintah	13 Kec	
27	Penyangga Hari Besar Keagamaan		tersedianya daging untuk konsumsi hari besar keagamaan	6 ekor	
28	Hari Krida Pertanian		terlaksannya Hari Krida Pertanian	3 dok	
29	Pengembangan sentra peternakan		luas lahan sentra peternakan	90 Ha	

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 2016

	<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>peningkatan pendapatan peternak</b>			Sanpras
30	Promosi dan panen ternak hasil inseminasi buatan		terlaksanannya promosi dan panen sapi IB	-	
31	penyusunan laporan informasi pasar peternakan		tersusunnya buku informasi pasar	12 bulan	
32	promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah		terlaksanannya promosi peternakan unggulan	1 kali	
	<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>	<b>tersedianya data peternakan yg valid dan up to date</b>			Sanpras
33	platihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna		terlaksanannya pelatihan TTG	4 kali	

## 2.4 PAGU ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016

Pagu Dinas Perkebunan untuk Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 900/62/KEU/2016 tentang *Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat*, dengan rincian berikut :

Tabel 2.11

### PAGU ANGGARAN DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

#### Bidang Perkebunan

No	Uraian	Target Kinerja Output	Total Anggaran (Rp.)
<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2,25 0,000.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	75,200,000.00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	72,800,000.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12,110,200.00
5	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	62,664,500.00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	13,625,000.00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	3,603,000.00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	6,000,000.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	4,200,000.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	179,000,000.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
11	Pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit	24,000,000.00
12	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	2 unit	19,000,000.00
13	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23 Unit	102,287,500.00
14	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	38 Unit	17,650,000.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
15	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 stel	16,450,000.00
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
16	Pengembangan SDM	5 orang	0.00

No	Uraian	Target Kinerja Output	Total Anggaran (Rp.)
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>			
17	Pemeliharaan Lanjutan Kebun Percontohan Kelapa Sawit dan Kebun Entres	9 Ha	139,030,000.00
18	Pembinaan dan inventarisasi kebun sawit swadaya	3 Kec.	159,220,000.00
<b>Program peningkatan Ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)</b>			
19	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman	100 Ha	75,840,000.00
20	Peningkatan perlindungan usaha perkebunan	13 Kec.	175,533,550.00
21	Pengembangan Jaringan Irigasi Lahan Perkebunan (TAM)	12 bulan	158,400,000.00
<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>			
22	promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi harga produksi perkebunan	12 bulan	87,081,500.00
<b>Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan</b>			
23	Pembinaan Lintas Sektoral	50 org, 1 paket, 1 paket	84,848,100.00
24	Pengolahan Data Statistik Perkebunan	20 dok	100,398,000.00
25	Pembibitan Kelapa Sawit	10.000 bibit	342,121,400.00
26	Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa, Pinang dan Kopi Libtukom	228.5 Ha Kelapa (3717 PIK), 7 Ha Pinang (250 PIP), 22 Ha Kopi (775 PIK)	202,800,600.00
27	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian	12 bulan	290,740,000.00
28	Sinkronisasi Program Perencanaan Perkebunan dan Pelaporan	3 dok	87,780,000.00
29	Intensifikasi Kebun Kopi Rakyat	90 Ha	303,792,500.00
<b>Jumlah Total</b>			<b>2,818,425,850.00</b>



Pagu Dinas Peternakan untuk Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 900/63/KEU/2016 tentang *Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat*, dengan rincian berikut :

**Bidang Peternakan**

No	Uraian	Target Kinerja Output	Total Anggaran (Rp.)
<b>Program pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	4,450,000.00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	58,200,000.00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	140 OB	68,600,000.00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	10,253,102.00
5	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	49,122,150.00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	6,239,000.00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	6,000,000.00
9	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	24,000,000.00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	123,250,000.00
11	Penyediaan Iklan Layanan	12 bulan	3,900,000.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
12	Pembangunan Gedung Kantor	5 Unit	147,641,746.00
13	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	100%	16,000,000.00
14	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	126,200,000.00
15	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	8,450,000.00
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	56 stel	19,600,000.00
<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>			
17	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3 dok	25,850,000.00

No	Uraian	Target Kinerja Output	Total Anggaran (Rp.)
<b>Program pengembangan Data/informasi/statistik Daerah</b>			
18	Pengolahan, updating dan analisa data dan statistik daerah	13 kec	118,139,000.00
<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak</b>			
19	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1000 ekor,1000 ekor,2000 ekor,1 paket, 2500 ekor, 100 ekor	246,600,000.00
20	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	13 kec	94,650,000.00
21	Pembelian dan Pendistribusian Obat-obatan Ternak,Vaksin dan Peralatan Medis	1 paket	214,999,995.00
<b>Program peningkatan produksi hasil peternakan</b>			
22	Pembibitan dan perawatan ternak	500 ekor	245,580,000.00
23	Pengembangan Inseminasi Buatan	1500 ekor	216,250,000.00
24	P2WKSS	2 kali	36,370,000.00
25	Sinkronisasi Birahi	1000 ekor	126,915,000.00
26	Pengelolaan Ternak Pemerintah	13 Kec	143,800,000.00
27	Penyangga Hari Besar Keagamaan	6 ekor	123,050,000.00
28	Hari Krida Pertanian	3 dok	91,650,000.00
29	Pengembangan sentra peternakan	90 Ha	156,845,000.00
<b>Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>			
30	Promosi dan panen ternak hasil inseminasi buatan	-	
31	penyusunan laporan informasi pasar peternakan	12 bulan	119,540,000.00
32	promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah	1 kali	17,800,000.00
<b>Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan</b>			
33	platihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	4 kali	120,264,600.00
<b>Jumlah Total</b>			<b>2,770,209,593.00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut peraturan tersebut, bahwa salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja, yang dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yaitu dengan memanfaatkan data kinerja, baik berupa data internal (dari dalam instansi) maupun data eksternal (dari luar instansi). Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas

fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

### 3.1.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Tanjab Barat dimaksudkan dalam laporan kinerja ini, adalah untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2013-2018, guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategik tersebut. Dalam kerangka pengukuran kinerja ini terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Adapun mengenai rumus yang digunakan untuk pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

Rumus 1:

Persentase Pencapaian Rencana	=	$\frac{\text{Realisasi Tahun } ^t}{\text{Target Rencana Tahun } ^t}$	x 100
----------------------------------	---	--	-------

Rumus 2:

Persentase Peningkatan/Penurunan capaian Kinerja	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } ^t - \text{Realisasi Thn } ^{t-1}}{\text{Realisasi Tahun } ^{t-1}}$	x 100
--	---	--	-------

Rumus 3:

Persentase Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } ^t}{\text{Realisasi Tahun } ^{t-1}}$	x 100
---	---	---	-------

Rumus 4:

Persentase Perbandingan dengan Target Jangka Menengah	=	$\frac{\text{Realisasi Thn Awal Renstra sd Thn } ^t}{\text{Target Akhir Renstra Tahun } ^n}$	x 100
--	---	--	-------

Rumus 5:

Persentase Perbandingan dengan Nasional	=	$\frac{\text{Realisasi Thn } ^t}{\text{Realisasi Nasional Thn } ^t}$	x 100
---	---	--	-------

Untuk memberikan makna terhadap nilai persentase pencapaian kinerja tersebut, maka ditentukan melalui sebutan sebagai berikut :

- 1) Nilai diatas 100% dengan sebutan sangat baik (SB)
- 2) Nilai diatas 80% s/d 100% dengan sebutan baik (B)
- 3) Nilai diatas 55% s/d 80% dengan sebutan cukup (C)
- 4) Nilai dibawah 55% dengan sebutan kurang (K)

### **3.1.2 PERBANDINGAN TARGET dan REALISASI INDIKATOR KINERJA**

#### **a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET dan REALISASI KINERJA TAHUN 2016.**

Target Kinerja 2016 yang sudah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Tanjab Barat, selama kurun waktu 2016 telah dilaksanakan dengan hasil pengukuran realisasi capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut ini:

BIDANG PERKEBUNAN					
Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian thd PK
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :			
		1.Sawit	133.858	131,068	97,91 %
		2.Karet	14.367	6,575	45,76 %
		3.Kelapa	55.824	50,837	91,06 %
		4.Kopi	1.238	1,323	106,86 %
		5.Pinang	11.208	9,426	84,10 %
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :			
		1.Luas Lahan Sawit	62.889	63,554	101,05 %
		2.Luas Lahan Karet	14.806	14,035	94,79 %
		3.Luas Lahan Kelapa	54.908	54,537	99,32 %
		4.Luas Lahan Kopi	3.073	2,873	93,49 %
		5.Luas Lahan Pinang	10.030	10,524	104,92 %
BIDANG PETERNAKAN					
Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2016	Realisasi	Capaian thd PK
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :			
		1.Daging Sapi	342.879	310.310	90,50%
		2.Daging Kerbau	12.952	9.218	71,17%
		3.Daging Kambing	54.769	22.748	41,53%
		4.Daging Domba	551	628	113,97%
		5.Daging Unggas	2.286.241	3,251,718	142,23%
		6.Kelahiran Ternak Sapi IB	1.000	1.810	181%
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :			
		1.Sapi	7.336	8.616	117,44%
		2.Kerbau	613	675	110,11%
		3.Kambing	40.235	71.586	177,92%
		4.Domba	640	750	117,18%
		5.Unggas	1.046.758	1,819,070	173,78%
<b>Rata-rata</b>					<b>107,43%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar **107,43%**. Jika dilihat masing-masing dari ke 4 indikator kerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran SS1 yaitu *Meningkatnya Produksi Daging Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Produksi Daging Ternak (kg) rata-rata komoditas ternak, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar **106,73%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi daging ternak secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
2. Untuk sasaran SS2 yaitu *Meningkatnya Populasi Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Jumlah Populasi Ternak pada tahun 2016 mencapai target kinerja rata-rata sebesar **139,286%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak, secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
3. Untuk sasaran SS3 yaitu *Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan*, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar **85,38%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas perkebunan secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan dianggap Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.
4. Untuk Sasaran SS6 yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Produktif*, dengan indikator 1 yaitu meningkatnya luas lahan produktif yg dikelola oleh masyarakat realisasi rata-rata sebesar **98,714%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan pengelolaan lahan produktif secara kualitatif dan kuantitatif



sudah dilakukan secara optimal dan dianggap Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.

Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2016 tersebut diatas, secara keseluruhan masih diperlukan adanya pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja secara optimal.

**b. PERBANDINGAN ANTARA TARGET dan REALISASI KINERJA DENGAN TARGET TOTAL RENSTRA 2016-2021.**

Dalam Dokumen Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021 telah ditentukan target kinerja tahunannya, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Adapun sebagai tolok ukur perkembangan capaian target kinerja Renstra tersebut maka dilakukan pengukuran capaian kinerja pada tahun yang sudah berjalan (2016) terhadap total target Renstra di tahun 2021 :

BIDANG PERKEBUNAN					
Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Renstra 2021	Realisasi 2016	Capaian thd Renstra 2021
SS3	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan.	Produksi Komoditi Perkebunan (ton) :			
		1.Sawit	147.790	131,068	88,68%
		2.Karet	15.863	6,575	41,44%
		3.Kelapa	61.635	50,837	82,47%
		4.Kopi	1.367	1,323	96,78%
		5.Pinang	12.375	9,426	76,17%
SS6	Meningkatnya pengelolaan Lahan Produktif	Bertambahnya Luas Lahan Perkebunan (Ha) :			
		1.Luas Lahan Sawit	67.750	63,554	93,80%
		2.Luas Lahan Karet	15.806	14,035	88,79%
		3.Luas Lahan Kelapa	56.294	54,537	96,87%
		4.Luas Lahan Kopi	3.310	2,873	86,79%
		5.Luas Lahan Pinang	11.800	10,524	89,18%
BIDANG PETERNAKAN					
Kode	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target 2021	Realisasi 2016	Capaian thd Renstra 2021
SS1	Meningkatnya Produksi Daging Ternak.	Produksi Daging Ternak (kg) :			
		1.Daging Sapi	378.567	310.310	81,97%
		2.Daging Kerbau	13.903	9.218	66,30%
		3.Daging Kambing	60.469	22.748	37,61%
		4.Daging Domba	608	628	103,28%
		5.Daging Unggas	2.524.952	3,251,718	128,78%
		6.Kelahiran Ternak Sapi IB	1.500	1.810	120,66%
SS2	Meningkatnya Populasi Ternak	Populasi Ternak (ekor) :			
		1.Sapi	8.096	8.616	106,24%
		2.Kerbau	646	675	104,48%
		3.Kambing	40.435	71.586	177,04%
		4.Domba	670	750	111,94%
		5.Unggas	1.335.957	1,819,070	136,16%
<b>Rata-rata</b>					<b>95,97%</b>

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU Tahun 2016 yang disajikan pada tabel tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar **95,97%**. Jika dilihat masing-masing dari ke 4 indikator kerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran SS1 yaitu *Meningkatnya Produksi Daging Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Produksi Daging Ternak (kg) rata-rata komoditas ternak, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar **89,76%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi daging ternak sampai tahun 2021 secara kualitatif dan kuantitatif optimis tercapai secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
2. Untuk sasaran SS2 yaitu *Meningkatnya Populasi Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Jumlah Populasi Ternak pada tahun 2016 mencapai target kinerja rata-rata sebesar **127,17%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak, secara kualitatif dan kuantitatif optimis melampaui target kerjanya sampai 2021.
3. Untuk sasaran SS3 yaitu *Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan*, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar **77,10%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas perkebunan secara kualitatif dan kuantitatif optimis tercapai sampai 2021.
4. Untuk Sasaran SS4 yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Produktif*, dengan indikator 1 yaitu meningkatnya luas lahan produktif yg dikelola oleh masyarakat realisasi rata-rata sebesar **89,76%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan pengelolaan lahan produktif secara kualitatif dan kuantitatif

sudah dilakukan secara optimal dan perlu dipertahankan sampai 2021 Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.

Dari gambaran hasil pengukuran tahun 2016 tersebut diatas, secara keseluruhan masih diperlukan adanya pemikiran untuk meningkatkan berbagai upaya yang perlu dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja secara optimal.

### **3.1.3 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA**

4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam upaya pencapaiannya memiliki beberapa kendala sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Dalam pencapaian Indikator yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, terdapat kendala berupa rendahnya produksi beberapa komoditas srategis. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah meningkatkan teknik budidaya melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman.
2. Dalam pencapaian indikator yaitu luas pengelolaan lahan perkebunan, terdapat kendala berupa tingginya penyusutan lahan perkebunan akibat adanya alih fungsi lahan maupun alih komoditas. Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah membuat peraturan yang lebih ketat terhadap gejala alih fungsi lahan, serta mendorong petani untuk tidak.
3. Untuk indicator bidang peternakan bahwa secara keseluruhan sudah baik dalam mencapai target dan sasaran kinerja

### 3.1.4 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan Program/Kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan Jawa Barat pada hakekatnya memerlukan ketersediaan sumber daya yang tidak sedikit, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya peralatan maupun sumber daya keuangan (anggaran pembangunan).

Dari segi pemanfaatan sumber daya alam, seperti sumber daya lahan, air, tanaman, plasma nutfah dan lain sebagainya, khususnya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, sejauh ini telah dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai upaya, antara lain dengan cara:

- Melakukan pengaturan/penataan pemanfaatan sumberdaya lahan berdasarkan tingkat kesesuaian lahannya, yaitu melalui pemetaan kesesuaian lahan perkebunan Jawa Barat;
- Melakukan pengembangan sumber benih melalui eksplorasi, identifikasi, penilaian dan penetapan kebun induk terpilih, maupun pohon induk terpilih, inventarisasi kekayaan plasma nutfah tanaman perkebunan, dan lain sebagainya;
- Mengembangkan lahan-lahan yang idle untuk dimanfaatkan sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan, melalui upaya perluasan, peremajaan, rehabilitasi serta pendukung prasarana perkebunan, seperti pengembangan sumber daya air, optimasi lahan dan irigasi;
- Melakukan pengembangan kaji terap teknologi budidaya perkebunan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan;
- Peningkatan kompetensi SDM aparatur perkebunan, dalam rangka meningkatkan kinerja OPD dalam mengembangkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan, pengembangan benih unggul, pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan, serta pengolahan produk perkebunan.

### 3.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN (ANGGARAN dan REALISASI BELANJA DAERAH)

Dari segi pemanfaatan anggaran pembangunan pada tahun 2016 juga dilakukan penghematan anggaran terkait dengan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) atas belanja-belanja yang secara teknis maupun administratif harus dilakukan penghematan. Adapun besarnya SILPA pada tahun anggaran 2016 ini adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	PROGRAM BIDANG PERKEBUNAN	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	431.452.700	15,31	377.964.811	87,60	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	162.937.500	5,78	147.902.100	90,77	100
3	Peningkatan Disiplin Aparat	16.450.000	0,58	15.317.500	93,12	100
4	Peningkatan Kesejahteraan Petani	298.250.000	10,58	258.710.800	86,74	100
5	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	409.773.550	14,54	368.779.100	90,00	100
6	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	87.081.500	3,09	77.481.500	88,98	100
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	1.412.480.600	50,12	1.244.627.000	88,12	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2.818.425.850</b>	<b>100,00</b>	<b>2.490.782.811</b>	<b>88,37</b>	<b>100</b>

No	PROGRAM BIDANG PETERNAKAN	ANGGARAN		REALISASI		
		Jumlah	Proporsi (%)	Keuangan		Fisik (%)
				Jumlah	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	354.014.252	12,78	335.172.705	94,68	100
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298.291.746	10,77	281.087.179	94,23	100
3	Peningkatan Disiplin Aparat	19.600.000	0,71	19.600.000	100,00	100
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.850.000	0,93	25.850.000	100,00	100
5	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	118.139.000	4,26	112.344.700	95,10	100
6	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	556.249.995	20,08	554.071.000	99,61	100
7	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.140.460.000	41,17	1.080.598.800	94,75	100
8	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	137.340.000	4,96	135.755.000	98,85	100
9	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	120.264.600	4,34	118.514.600	98,54	100
<b>JUMLAH</b>		<b>2.770.209.593</b>	<b>100,00</b>	<b>2.665.172.979</b>	<b>96,21</b>	<b>100</b>

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja IKU yang disajikan pada tabel 3.1 tersebut di atas, secara keseluruhan diperoleh hasil rata-rata sebesar **107,43%**. Jika dilihat masing-masing dari ke 4 indikator kerjanya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk **Sasaran SS1** yaitu *Meningkatnya Produksi Daging Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Produksi Daging Ternak (kg) rata-rata komoditas ternak, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar **106,73%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi daging ternak secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
2. Untuk **Sasaran SS2** yaitu *Meningkatnya Populasi Ternak*, ternyata indikator (1) yaitu Jumlah Populasi Ternak pada tahun 2016 mencapai target kinerja rata-rata sebesar **139,286%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan populasi ternak, secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan mampu melampaui target kerjanya.
3. Untuk **Sasaran SS3** yaitu *Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan*, ternyata indikator (1) yaitu prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan, pada tahun 2016 mencapai target kinerja sebesar **85,38%**. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan produksi dan produktiitas komoditas perkebunan secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan dianggap Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.



4. Untuk Sasaran SS6 yaitu *Meningkatnya Pengelolaan Luas Lahan Produktif*, dengan indikator 1 yaitu meningkatnya luas lahan produktif yg dikelola oleh masyarakat realisasi rata-rata sebesar 98,714%. Kondisi tersebut dapat ditafsirkan, bahwa upaya yang dilakukan OPD dalam mendorong peningkatan pengelolaan lahan produktif secara kualitatif dan kuantitatif sudah dilakukan secara optimal dan dianggap Baik namun dengan catatan perlu ditingkatkan lagi.

Untuk serapan anggaran Bidang Perkebunan sebesar 88,37% dengan realisasi fisik sebesar 100%, sedangkan Bidang Peternakan serapan anggaran sebesar 96,21% realisasi fisik 100%.

Berbagai kendala dan masalah yg dihadapi menjadi tolak ukur dalam pengambilan kebijakan untuk tahun masa yg dating.

Kuala Tungkal, 20 - 02 - 2017

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan  
Kabupaten Tanjung jabung Barat



Ir. Melani Bangun

Pembina Utama Muda

NIP. 19611215 199303 1 003